

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, timbulnya kredit macet pada dunia perbankan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank. Adanya kredit macet terlalu banyak akan menyebabkan kerugian yang besar, dan kerugian ini akan menghambat operasi perusahaan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah sebagai berikut:

(1) Pihak debitur memiliki unsur kesengajaan untuk tidak membayar kewajiban kreditnya kepada bank sehingga kredit yang diberikan pihak bank macet (bermasalah), dan (2) pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisisnya atau pertimbangan sebelumnya, pihak yang memprediksi kurang teliti sehingga hal yang seharusnya terjadi tetapi tidak terprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan penafsiran atau perhitungannya.

Menurut Widjaja mengemukakan bahwa :

“Prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan misalnya orang, jaringan gudang yang harus dilayani dengan cara yang tertentu oleh sejumlah pabrik dan pada gilirannya akan mengirimkan pelanggan menurut proses tertentu”.¹

¹A.W.Widjaja, Administrasi kepegawaian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 83

Menurut Kammaruddin mengemukakan bahwa:

“Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi”².

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

Secara umum prosedur pemberian kredit (Kasmir 2002: 110)

Adalah mulai tahap-tahap permohonan kredit, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara satu, on the spot, wawancara dua, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, atau perjanjian lainnya, penyaluran atau penarikan dana³.

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998,

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2012:113)⁴.

Menurut Thamrin (2012: 162) istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan.⁵

Seseorang atau suatu instansi yang memberikan kredit (Kreditor) percaya bahwa penerima kredit (Debitur) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan berdasarkan ketentuan atau perjanjian yang

² Kamaruddin, Pengertian Prosedur, <http://necel.wordpress.com>, 1992

³ Kasmir, Bank dan Lembaga keuangan lainnya, Edisi Revisi, Cetakan keenam : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 110

⁴ Kasmir, Analisis Laporan Keuangan : PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 113

⁵ Abdullah, Thamrin, Manajemen Pemasaran : PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal 162

telah disepakati oleh pihak bank dan pihak debitur yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar utang pada jangka waktu yang sudah ditentukan dengan pemberian bunga.

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah atau debitur. Keuntungan yang diperoleh ini sangat penting untuk kelangsungan hidup bank, oleh karena itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang mengalami kerugian, maka kemungkinan besar bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Sehingga sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Pasal 1 No.7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan pasal 1 angka 23 UU perbankan No.10 tahun 1998 Pengertian Agunan adalah kemampuan/Keyakinan/Kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan.

Menurut Widiyono mengemukakan bahwa :

Agunan dalam perbankan adalah benda bergerak ataupun tidak bergerak yang diserahkan debitur kepada kreditur yang berguna untuk meminjam apabila terjadi kondisi dimana fasilitas kredit tidak dibayar kembali sesuai waktu yang telah ditetapkan.⁶

Agunan atau lebih dikenal dengan jaminan ini digunakan untuk menutupi resiko kerugian bank, apabila debitur tidak melunasi kredit yang sudah di pinjamkan oleh pihak bank atau gagal kredit (penunggakan pembayaran). Agunan

⁶ Widiyono, **Agunan Kredit dalam Financial Engineering** : Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

ini dapat dijual sebagai pelunasan kredit yang dijaminan oleh debitur kepada pihak bank. Agunan dapat dijual apabila debitur tidak membayar kewajibannya melebihi dari 3 bulan atau 3 kali angsuran, kesepakatan ini dibuat dengan pihak bank yang dipinjamnya.

Tujuan utama bank meminta Agunan kepada debitur supaya debitur memiliki kewajiban tepat waktu untuk pembayaran kreditnya dan supaya tidak terjadi kegagalan kredit, akan tetapi masih banyak debitur yang belum begitu sadar akan kewajibannya untuk membayar kreditnya.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Yenni Vera Fibriyanti dan Oktavia Ikke Wijaya (2018) hasil penelitiannya yaitu Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Lamongan kepada debiturnya sangat efektif dengan presentase sebesar 89,86% karena telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Bank PD. BPR Bank daerah Lamongan. Selanjutnya Eka Winda Yuliana dan Hesti Widiyanti (2014) yaitu Fungsi-fungsi yang terkait dalam pemberian kredit pada Unit Simpan pinjam KUD Karya Mina Kota Tegal sudah cukup baik karena setiap fungsi selalu bekerja sama dengan baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hadion Wijoyo (2020) Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada PT. Indomitra mandiri yaitu: bahwa pihak bank telah melaksanakan survey sebelum memberikan kredit kepada debitur (*Character*) tetapi tidak memandang latar belakang pendidikan calon debiturnya (*Capacity*).

Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia (2019) menjelaskan dalam setiap kegiatan kredit sangat diperlukan manajemen kredit yang baik. Suatu cara yang

dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan adalah melaksanakan penagihan piutang kepada konsumen yaitu **“Manginformasikan konsumen yang tertagih bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk melunaskan piutang kepada pihak penagih”**⁷. Piutang menimbulkan tindakan penagihan dari pihak pemberi kredit terhadap pihak penerima kredit. Memaksimalkan pembayaran dan meminimalkan kerugian piutang yang tidak tertagih merupakan tujuan dari penagihan.

Apabila kredit telah diberikan oleh pihak pemberi kredit maka diperlukan upaya untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan syarat dan waktu yang telah disepakati. Penagihan hendaknya dilaksanakan oleh bagian yang ditunjuk untuk melakukan penagihan kredit terhadap penerima kredit yang disebut kolektor. Menurut Taroreh, Warongan, dan Runtu, (2016) dalam Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia (2019) terdapat beberapa cara penagihan piutang yaitu: **“Penagihan piutang dapat ditagih melalui surat, melalui telepon, kunjungan personal dan tindakan hukum”**⁸

Dilihat dari kenyatannya, kredit yang disalurkan PT.BTN Kantor Cabang Medan kepada nasabah mengalami masalah yaitu kredit macet dimana kredit bermasalah ini digolongkan menjadi tiga yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Dapat diuraikan masalah tersebut diantaranya adalah ketidaktepatan waktu dalam pembayaran pokok kredit dan pembayaran bunga pinjaman kredit yang sudah ditentukan oleh pihak bank.

⁷ Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia, **Analisis Prosedur Pemberian Kredit dan Penagihan Piutang Dalam Meminimalkan Piutang Tidak Tertagih Pada PT. Aneka Tata Niaga**: Universitas Putera Batam, Batam, 2019, hal. 2

⁸ **Op.Cit.**, hal 2

Adapun data mengenai jumlah pemberian kredit konsumen dan persentase kredit yang bermasalah (NPL) pada PT. BTN Kantor Cabang Medan periode 2021, tertera pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Jumlah Pemberian Kredit KPR PT.BTN Kantor Cabang Medan Tahun 2021

Keterangan	Jumlah Kredit yang diberikan (dalam Rupiah)
Kredit Lancar	4.587.232.037.760
Kredit DPK	248.290.576.077
Kredit Kurang Lancar	3.458.704.749
Kredit Diragukan	6.124.590.375
Kredit Macet	132.863.284.051
Total Kredit	4.977.969.200.000

Sumber : PT.BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan

Dari tabel 1.1 dapat diketahui pada tahun 2021 total kredit yang diberikan kepada para debitur sebesar Rp. 4.977.969.200.000, dari jumlah pemberian kredit tersebut terdapat kredit macet sebesar Rp. 132.863.284.051 dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2,6% dari jumlah kredit yang diberikan dan terdapat NPL (kredit yang menunggak melebihi 90 hari) yang terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet ($3.458.704.749 + 6.124.590.375 + 132.863.284.051$) = Rp. 142.446.579.175 dengan rasio non performing loan sebesar 2,8%.

Berdasarkan persentase kredit bermasalah diatas maka terdapat kredit bermasalah sebesar 2,8%. **“Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI), bahwa bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan**

kelangsungan usahanya apabila rasio kredit bermasalah (non performing loan) secara bruto lebih dari 5%”⁹. Dalam hal tersebut rasio NPL pada PT.BTN Kantor Cabang Medan masih dibawah 5%, yang artinya kredit bermasalah masih terbilang baik.

Apabila kredit bermasalah (kredit macet) tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi kerugian materi bagi PT.BTN Kantor Cabang Medan, kerugian yang timbul akibat kredit bermasalah adalah aliran kas yang terganggu, kesempatan bisnis yang hilang, berkurangnya alokasi sumber daya, dan kerugian materi misalnya nilai jaminan sudah tidak cukup lagi untuk menutup seluruh kewajiban debitur akibat biaya denda yang terus meningkat, dan biaya pengadilan.

Prosedur yang tepat sangat berperan dalam pemberian dan penagihan kredit. Prosedur-prosedur dalam sistem pemberian kredit terdiri dari pemberian kredit oleh nasabah yang harus diikuti dengan kelengkapan berkas dokumen kredit dari nasabah, analisa kredit oleh bank, keputusan atas permohonan apakah diterima atau ditolak, dan pengawasan kredit. Sedangkan tahapan penagihan kredit terdiri dari pemberian surat pemberitahuan kepada debitur bahwa kredit telah jatuh tempo, memberikan surat pemberitahuan kedua apabila debitur membayar kredit hingga surat pemberitahuan ketiga nasabah belum membayar kredit, maka bagian ini membuat pertemuan untuk negosiasi, pengambilan agunan apabila nasabah tidak mampu membayar kredit dan pengajuan kredit kepada badan pengadilan negeri untuk diproses apabila tidak memiliki niat baik untuk melunasi kreditnya.

⁹ Bank Indonesia, **Peraturan Bank Indonesia**, Pasal 8 ayat 1, hal 9

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan merupakan salah satu lembaga yang bergerak dibidang perbankan. Bank ini merupakan bank devisa yang kegiatan operasional utamanya bergerak dibidang pengkreditan, selain kegiatan operasional ada juga penggarapan dana dari pihak ketiga yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit yang diberikan berupa kredit konsumen dan kredit komersial. Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat maka resiko yang akan terjadi juga semakin besar.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih judul skripsi **“Prosedur Pemberian dan Penagihan Kredit Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana prosedur pemberian dan penagihan kredit yang dilaksanakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Prosedur Pemberian dan Penagihan Kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Yang diharapkan dari penelitian ini adalah secara teoritis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian sejenis atau bahan bacaan bagi mahasiswa guna memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi lebih lanjut.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah pada kehidupan berbisnis di lapangan.
4. Dapat menjadi masukan bagi pengurus PT.BTN Kantor Cabang Medan agar lebih memperhatikan dan meningkatkan dalam prosedur pemberian dan penagihan kredit.

Yang diharapkan dari penelitian ini adalah secara Praktis :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat agar lebih memahami bagaimana cara menganalisis data dan memecahkan masalah yang nyata melalui teori yang didapatkan.

Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur pemberian dan penagihan kredit pada PT.BTN Kantor Cabang Medan.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan PT.BTN Kantor Cabang Medan untuk pengelolaan pemberian dan penagihan

kredit sehingga menghasilkan pengelolaan prosedur yang lebih baik dan berkualitas.

3. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta menjadi bahan masukan dalam mengatasi permasalahan yang sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Prosedur

2.1.1 Pengertian Prosedur

Pada dasarnya setiap perusahaan terutama lembaga keuangan atau perbankan mempunyai aturan atau urutan-urutan, serta rangkaian kegiatan kerja yang biasa dikenal dengan istilah prosedur.

Maka para ahli mengemukakan pengertian prosedur antara lain:

Menurut Mulyadi mengemukakan bahwa :

“Prosedur adalah sistem urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”¹⁰

Menurut Baridwan mengemukakan bahwa :

“Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, umumnya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap transaksi-transaksi perubahan yang terjadi secara berulang-ulang.”¹¹

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa prosedur dapat diartikan sebagai urutan-urutan atau rangkaian kegiatan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang untuk menjalin penanganan secara seragam untuk mencapai tujuan tertentu.

¹⁰ Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi Tiga : Salemba empat, 2001,hal 5

¹¹ Baridwan, **Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode**, BPFE, Yogyakarta, 2009,hal 3

Sistem pemberian kredit terdiri dari beberapa unsur yaitu:

a. Fungsi yang terkait:

- 1) Fungsi kredit, yaitu fungsi ini berada dibawah bagian keuangan yang bertanggungjawab untuk meneliti status kredit pelanggan.
- 2) Fungsi penagihan, yaitu fungsi yang mempunyai tanggungjawab dalam penyelesaian kredit.
- 3) Fungsi Akuntansi, yaitu fungsi yang bertanggung jawab dalam mencatat atau mengelola data semua transaksi yang terjadi

b. Dokumen yang digunakan:

- 1) Surat Penegasan Persetujuan Kredit Kepada Pemohon.
Surat Penegasan Persetujuan Kredit yaitu persetujuan atas permohonan kredit disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- 2) Pengikatan jaminan
dalam pengikatan jaminan kredit, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Perbedaan antara jaminan pokok dengan jaminan tambahan.
 - b) Peminjaman dokumen yang telah ada dalam penguasaan bank kepada nasabah tidak diperkenankan.
- 3) Penandatanganan Perjanjian Kredit
Perjanjian kredit harus ditandatangani oleh nasabah diatas materai yang cukup dan mengembalikan kepada bank.
- 4) Formulir Permohonan Kredit
Formulir yang diisi oleh calon debitur didalam pengajuan kredit.

5) Formulir syarat-syarat kelengkapan data

Formulir yang harus dilengkapi oleh calon debitur yang digunakan sebagai kelengkapan data.

c. Catatan akuntansi yang digunakan

1) Jurnal umum

Jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi.

2) Buku besar

Buku besar adalah kumpulan akun tempat menghitung dan memerinci perubahan aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang bersumber dari pos-pos jurnal.

3) Buku besar pembantu

Adalah tempat pencatatan akun-akun yang sering terjadi dan banyak jumlah banyak.

d. Prosedur kredit

Dalam pengajuan permohonan kredit, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan.

Menurut Thomas Suyatno, dkk mengatakan bahwa: Prosedur pemberian kredit ada 7 yaitu,

1. Tahap permohonan kredit
2. Tahap penyidikan analisis kredit
3. Tahap keputusan atas permohonan kredit
4. Penolakan permohonan kredit
5. Tahap persetujuan permohonan kredit
6. Tahap pencairan fasilitas kredit
7. Tahap pelunasan kredit¹²

¹² Thomas, **Dasar-Dasar Perkreditan**, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal 69-86

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Tahap permohonan kredit, permohonan fasilitas kredit mencakup:
 - a) Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit.
 - b) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
 - c) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
 - d) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan atau pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Tahap permohonan kredit terdiri dari:

- a) Pengumpulan berkas

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

- (1) Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- (2) Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
- (3) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

- b) Pencatatan

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

(1) Kelengkapan dan berkas permohonan

Permohonan dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kredit. Selama permohonan kredit sedang dalam proses, maka berkas-berkas permohonan harus dipelihara.

(2) Formulir daftar isian permohonan kredit

Untuk memudahkan bank memperoleh data yang diperlukan, bank mempergunakan Daftar Isian Permohonan Kredit yang harus diisi oleh nasabah, formulir-formulir neraca, daftar laba/rugi.

2) Tahap penyidikan analisis kredit.

Yang dimaksud penyidikan kredit adalah:

- a) Wawancara dengan pemohon kreditur atau debitur.
- b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern.
- c) Pemeriksaan atau penyidikan kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lain-lain yang diperoleh.
- d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan analisis kredit adalah:

- a) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
 - b) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengembalian keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.
- 3) Tahap keputusan atas permohonan kredit
- Setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.
- 4) Penolakan permohonan kredit.
- Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.
- 5) Tahap persetujuan permohonan kredit.
- Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.
- 6) Tahap pencairan fasilitas kredit
- Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank.

7) Tahap pelunasan kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian kredit

Menurut I Wayan Sudirman:

“Kredit adalah penyediaan sejumlah uang atau dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu oleh bank berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak pemimpin atau debitur dan atau peminjam diwajibkan melunasi pinjaman atau utangnya itu dalam jangka waktu tertentu dan jumlah bunga yang disepakati”.¹³

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” atau dalam bahasa latin *creditum* , yang artinya kepercayaan. Kepercayaan ini maksudnya pihak kreditor percaya kepada pihak debitur bahwa kredit yang diberikan pasti akan dibayar sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Sedangkan pihak debitur menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Sebelum kredit diberikan, terlebih dahulu bank melakukan analisis kredit agar bank dapat yakin dan percaya kepada nasabah. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, serta jaminan yang diberikan. Oleh sebab itu, bagi bank sangat penting untuk dilakukannya analisis kredit sebelum kredit tersebut diberikan. Tujuan daripada analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

¹³ I Wayan Sudirman, **Manajemen Perbankan**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal 57

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat berdampak buruk bagi bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih dengan kata lain macet.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi undang-undang Nomor 10 Tahun 1998:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁴

Dari pengertian kredit diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang (tagihan) yang nilainya diukur dengan uang. Contoh bentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Dari pengertian tersebut berarti nasabah tidak memperoleh uang tetapi rumah, karena bank membayar langsung ke developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Dalam hal perjanjian kredit, tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang disepakati bersama.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Sebelum kredit diberikan, ada baiknya pihak bank dan nasabah mengetahui dan memahami unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang perbankan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

- 1. Kepercayaan**
- 2. Kesepakatan**
- 3. Jangka waktu**
- 4. Resiko**
- 5. Balas Jasa¹⁵**

Penjelasannya sebagai berikut ini:

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan yang diberikan oleh pihak bank (pemberi kredit) kepada nasabah (penerima kredit) baik berupa uang, barang atau jasa dan akan diterima kembali pada waktu yang telah disepakati. Kepercayaan ini diberikan oleh pihak bank, karena sebelum dana dicairkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang diberikan.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

¹⁵ Kasmir, **Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi, cetakan kelima belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal 87

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pihak bank pasti memiliki jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Resiko

Penyebab kredit tidak tertagih/ macet sebenarnya dikarenakan adanya suatu waktu tenggang waktu pengembalian. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini merupakan tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja. Contohnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga atau bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dengan bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.3 Tujuan Kredit

Setiap pemberian kredit, pasti ada tujuan yang ingin dicapai dan tujuan tersebut tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dana memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.¹⁶

2.2.4 Fungsi Kredit

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas, kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas.

Adapun Fungsi kredit menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan peredaran barang,
2. Untuk meningkatkan daya guna uang,
3. Untuk meningkatkan peredaran dan lalulintas uang,
4. Untuk meningkatkan daya gunabarang,
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi,
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha,
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, dan
8. Untuk meningkatkan hubungan international.¹⁷

Penjelasan nya sebagai berikut:

1. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

¹⁶ *Ibid*, hal 88

¹⁷ Kasmir, *OP.Cit.*,hal 107

2. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, artinya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh sipenerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

3. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

4. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang awalnya tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengeksport barang dari dalam dan luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi debitur tentu akan meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

2.2.5 Jenis – Jenis Kredit

Dengan banyaknya jenis-jenis kegiatan usaha masyarakat, maka beragam pula kebutuhan jenis kreditnya. Kredit terdiri dari beberapa jenis, begitu juga dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi.

Menurut Malayu jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut:

1. **Berdasarkan Tujuan Kegunaannya**
2. **Berdasarkan Jangka Waktu**
3. **Berdasarkan Macamnya**
4. **Berdasarkan Sektor Perekonomian**
5. **Berdasarkan Agunan / Jaminan**
6. **Berdasarkan Golongan Ekonomi**
7. **Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan**¹⁸

Penjelasan atas ke 7 jenis-jenis kredit diatas adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tujuan Kegunaannya
 - a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, contoh kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya.
 - b. Kredit modal kerja (Kredit perdagangan) yaitu kredit yang akan digunakan untuk menambah modal usaha debitur.
 - c. Kredit investasi ialah kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya kredit ini diberikan *grace perio*, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit.
2. Berdasarkan jangka waktu
 - a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lma satu tahun saja.
 - b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun

¹⁸ H. Malayu S.P. Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**, Cetakan Kesepuluh, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hal 89

- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun
3. Berdasarkan macamnya
 - a. Kredit aspek yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakekatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit (L3/BMPK)-nya.
 - b. Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian.
 - c. Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka
 4. Berdasarkan Sektor Perekonomian
 - a. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
 - b. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.
 - c. Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
 - d. Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
 - e. Kredit *ekspor-impor* ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.
 - f. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi seperti dokter dan guru.

5. Berdasarkan Agunan / Jaminan
 - a. Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia.
 - b. Kredit agunan dokumen ialah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti *letter of credit* (L/C).
 - c. Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
 - d. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
6. Berdasarkan golongan ekonomi
 - a. Golongan ekonomi lemah adalah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi, seperti KUK, KUT, dan lain-lain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp.600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
 - b. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
7. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan
 - a. Kredit rekening koran (Kredit Perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafod kredit. Kredit rekening koran baru dapat ditarik setelah plafod kredit disetujui.

- b. Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafodnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

2.2.6 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Ada beberapa prinsip-prinsip pemberian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C.

Menurut Kasmir prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dibagi atas 5 yaitu:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Colleteral*
5. *Condition*¹⁹

Adapun penjelasan 5C diatas adalah sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter)

Karakter yang dimaksud disini adalah sifat atau watak calon debitur. Hal ini dilakukan untuk menyakinkan bank bahwa sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Terdapat beberapa indikasi yang diperhatikan bank untuk melihat karakter dari calon debitur. Pertama, apakah calon debitur memiliki reputasi yang tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis dan bank. Kedua, apakah debitur memiliki hubungan yang tidak baik dengan pihak lain. Ketiga, apakah debitur berganti-ganti supplier dan tidak mendapat fasilitas hutang dagang. Hal ini merupakan indikasi bahwa debitur tidak dapat dipercaya karena sering ingkar janji. Bank menganalisisnya dari beberapa

¹⁹ Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hal 101

faktor diantaranya melalui info lingkungan tempat tinggal dan tempat usaha untuk melihat reputasi, trade checking untuk melihat hubungan bisnis dan bank checking untuk melihat hubungan debitur dengan bank.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3. *Capital* (Modal)

Yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari lapangan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungki. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition* (Kondisi)

Dalam meneliti kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing.

2.2.7 Pengertian Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menentukan atau menetapkan seseorang atau nasabah layak diberikan kredit atau

tidak. Dalam hal ini para ahli mengemukakan tentang pengertian prosedur pemberian kredit, antara lain sebagai berikut:

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti mengatakan bahwa:

“Prosedur pemberian kredit adalah kegiatan suatu perusahaan untuk menetapkan/memilih nasabah yang paling tepat pula dari calon-calon yang dapat diberikan kredit”.²⁰

Dari pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit merupakan suatu proses pemilihan orang-orang/calon debitur yang dianggap sesuai dengan persyaratan untuk menerima kredit.

Prosedur pemberian kredit dibedakan menjadi dua yaitu pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum. Apabila di tinjau dari segi tujuannya yakni untuk keperluan konsumtif ataukah keperluan produktif.

Adapun *Standard Operating Procedure* pemberian kredit secara umum yang ditetapkan oleh Bank BTN dan juga badan hukum perbankan yang dikutip dari Kasmir dalam buku manajemen perbankan adalah sebagai berikut:

1. **Pengajuan Berkas-Berkas**
2. **Penyelidikan Berkas Pinjaman**
3. **Wawancara Awal**
4. **On The Spot**
5. **Wawancara Kedua**
6. **Keputusan Kredit**
7. **Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya**
8. **Realisasi Kredit**
9. **Penyaluran atau Penarikan dana**²¹

²⁰ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, **Manajemen Perkreditan Bank Umum** : Alfabeta, bandung, 2004, hal 6

²¹ Kasmir, **Op.Cit.**, hal 143

Penjelasan diatas diuraikan sebagai berikut:

1. Pengajuan Berkas – Berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Dalam setiap pengajuan proposal kredit hendaknya berisi tentang:

a. Riwayat perusahaan

Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus, latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta wilayah pemasaran produk. Jadi, riwayat perusahaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan dari latar belakang perusahaan sampai produk dan cara pemasarannya.

b. Tujuan pengambilan kredit

Dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi. Jadi, tujuan pengambilan kredit merupakan tujuan si calon debitur dalam pengambilan kredit dibank.

c. Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya.

d. Cara pemohon mengembalikan kredit

Maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.

e. Jaminan kredit

Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal pengajuan kredit KPR ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

- a. Fotocopy KTP Pemohon
- b. Bukti diri (KTP) Suami dan Istri
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pribadi
- e. Slip gaji Asli atau Surat Keterangan Penghasilan, minimal 1 bulan terakhir
- f. Fotocopy rekening koran
- g. Fotocopy sertifikat yang dijadikan jaminan kredit
- h. Daftar penghasilan bagi perseorangan
- i. Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan

2. Pemeriksaan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki

keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaliknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara Awal

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan bank.

Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut dicocokkan dengan hasil wawancara awal.

5. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya.

6. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung
- b. Melalui notaris

7. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan dana kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.

Malayu mengatakan bahwa Penyaluran kredit juga memiliki prosedur yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Calon debitur menuliskan nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit;
- b. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan;
- c. Analisis kredit dengan cara mengikuti asa 5C, 7P, dan 3R dari permohonan kredit tersebut;
- d. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau *Legal Lending Limit (L3)* atau BMPK nya.
- e. Jika BMPK disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak.²²

2.3 Penagihan

2.3.1 Pengertian Penagihan

Menurut Baridwan (2004), **“Tagihan merupakan suatu tindakan kewajiban perusahaan atas uang, barang-barang atau jasa-jasa terhadap pihak lain”**.²³

²² Malayu S.P. Hasibuan, **Op.Cit**, hal 91

Dalam pengertian akuntansi tagihan biasanya digunakan untuk menunjukkan kewajiban yang akan dilunasi dengan uang. Tagihan dapat terlihat dari berbagai macam sumber, namun jumlah yang terbesar biasanya terlihat dari penjualan barang atau jasa.

Adapun pengertian penagihan adalah memberikan informasi dan mengingatkan pihak debitur (nasabah) bahwa memiliki kewajiban untuk membayarkan utangnya kepada pihak kreditur (Bank) yang memberikan pinjaman.

2.3.2 Prosedur Penagihan Kredit

Prosedur penagihan berfungsi membuat surat perjanjian jatuh tempo dan mengirimkan kepada debitur.

Berikut ini *Standard Operating Procedure* Penagihan kredit yang ditetapkan oleh Bank BTN adalah sebagai berikut:

- 1 Strategi umum *smart collection*.
- 2 Pengiriman SMS, Email & Multimedia *Blast*.
- 3 Manajemen Penagihan Via Telepon dan *Voice Notification*.
- 4 Pengkinian data debitur.
- 5 Manajemen penagihan di lapangan.
- 6 Penempelan stiker dan penyemprotan terhadap agunan bank.
- 7 Kebijakan pemberian surat peringatan.
- 8 Pembantu pembina debitur (tenaga alih daya) & Perjanjian kerjasama penyedia jasa tenaga kerja alih daya.
- 9 Pengelolaan angsuran kolektif & perjanjian kerjasama kolektif.²⁴

²³Baridwan, *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan, Cetakan Pertama, 2014, Hal 123

²⁴ Surat edaran, Direksi PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk, Nomor 6, 2020, hal 7

Penjelasannya sebagai berikut:

1. Strategi Umum *Smart Collection*.

Strategi *smart collection* (Modul Bank BTN:2020) adalah strategi penyempurnaan pengelolaan/pemeliharaan kualitas kredit *consumer*, yang didasari atas pertimbangan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip strategi *smart collection* antara lain adalah:

- a. Terintegrasi dan menyeluruh artinya strategi disusun dengan berdasarkan cara pandang yang sama terhadap debitur di seluruh tahapan proses pembinaan debitur Konsumer.
- b. Solusi yang terkait dengan masalah, strategi yang disusun memiliki keterkaitan dan diharapkan menjadi solusi atas permasalahan yang ada baik ditataran strategi maupun operasional di lapangan.
- c. Tindakan berbasis profiling yaitu segala upaya di dalam strategi berlandaskan pemahaman yang baik atas debitur berdasarkan informasi yang handal.
- d. Penyempurnaan terus menerus, tindakan yang ada dalam strategi merupakan tujuan pembinaan dan penanganan yang terus disempurnakan sehingga terdapat tindakan yang sifatnya jangka pendek dan juga yang jangka panjang.

2. Pengiriman SMS, Email & Multimedia Blast

Adalah pemberitahuan/notifikasi/ucapan terimakasih melalui media elektronik yang disampaikan oleh bank kepada Debitur

3. Manajemen Penagihan Via Telepon dan Voice Notification (*Call Collection Management*)

Adalah unit dikantor pusat yang memiliki tugas utama untuk melakukan komunikasi telepon dengan debitur baik untuk melakukan penagihan maupun tugas lainnya yang terdiri dari *Agent*, *Supervisor* dan *Unit Head*

4. Pengkinian data debitur

Adalah proses yang dilakukan untuk memutakhirkan/mengupdate database Debitur.

5. Manajemen penagihan dilapangan

Adalah kegiatan pemeriksaan langsung kelapangan dengan menagih pembayaran tunggakan dari para debiturnya

6. Penempelan Stiker dan Penyemprotan Terhadap Agunan Bank

Adalah proses penyitaan agunan jika pembayaran kredit sudah sampai di SP 3

7. Kebijakan Pemberian Surat Peringatan

Jika sudah melewati tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak bank setelah pengiriman surat teguran, tetapi pihak debitur belum memberikan respons yang baik, maka perusahaan akan menetapkan surat peringatan pertama hingga ke tiga

8. Pembantu Pembinaan Debitur (Tenaga Alih Daya) & Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Tenaga Kerja Alih Daya.

Adalah perusahaan yang membantu pembinaan debitur dapat berupa PT, Koperasi, Instansi/badan usaha atau perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

9. Pengelolaan angsuran kolektif & Perjanjian Kerjasama Kolektif

Adalah rangkaian aktifitas pembayaran angsuran secara bersama-sama melalui bendahara/kolektor dimana merupakan salah satu kunci sukses pengelolaan kredit.

2.3.3 Teknik Penyelesaian Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu masalah yaitu masalah kredit macet. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga akan menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak bank.

Adapun yang menyebabkan kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu:

“1.Dari pihak Perbankan;

2.Dari pihak Nasabah”²⁵

Berikut penjelasan dari kedua pernyataan diatas :

1. Dari pihak Perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen ataupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Maka perlu dilakukan suatu prediksi untuk mengetahui kemungkinan apa yang terjadi kedepannya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat konspirasi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan tidak objektif.

2. Dari pihak Nasabah

Kemacetan kredit disebabkan oleh 2 unsur yaitu:

²⁵ **Ibid**, hal 120

- a. Adanya unsur kesengajaan. Maksudnya adalah nasabah sengaja tidak mau membayar kewajiban kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Maksudnya adalah nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usahanya terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.

Untuk mengatasi kredit macet, diperlukan penyelamatan, sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian akibat terjadinya kredit macet. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara:

- a. *Rescheduling*
- b. *Reconditioning*
- c. *Restructuring*
- d. **Kombinasi**
- e. **Penyitaan jaminan**²⁶

1. *Rescheduling*

Yaitu dengan cara:

- a. Dalam hal ini si penerima kredit (nasabah) diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran
Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu

²⁶ **Ibid**, hal 121

saja jumlah angsuran pun mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- c. Penurunan suku bunga.
- d. Pembebasan bunga.

3. *Restructuring*

Yaitu dengan cara :

- a. Menambah jumlah kredit
- b. Menambah equity yaitu:
 - Dengan menyetor uang tunai
 - Tambahan dari pemilik

4. Kombinasi

Yaitu kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas.

5. Penyitaan Jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utangnya.

2.4. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada tabel 2.1 disajikan keseluruhan jurnal penelitian terdahulu yang berguna untuk membantu penelitian dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia (2019)	Analisis Prosedur Pemberian Kredit dan Penagihan Piutang Dalam Meminimalkan Piutang Tidak Tertagih Pada PT Aneka Tata Niaga	Kualitatif Deskriptif	Prosedur pemberian kredit pada PT. Aneka Tata Niaga diawali dengan mengisi formulir data pelanggan baru yang kemudian akan disetujui oleh manajer sales dan direktur. Penagihan piutang pada PT. Aneka Tata Niaga dilakukan oleh bagian admin piutang dalam menyiapkan invoice dan kwintansi yang diperlukan dalam penagihan kepada pelanggan.
2	Eka Winda Yuliana dan	Sistem Pemberian Kredit Pada Unit	Kualitatif	Fungsi-fungsi yang terkait dalam pemberian

	Hesti Widianti (2014)	Simpan Pinjam KUD Karya Mina Kota Tegal	Deskriptif	<p> kredit pada Unit Simpan Pinjam KUD Tegal sudah cukup baik karena setiap fungsi selalu bekerja sama dengan baik dan masing-masing bagian mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.</p>
3	Ibrahim (2019)	<p> Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah Pada PT.BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang</p>	<p> Penelitian Deskriptif</p>	<p> Sistem Akuntansi Pemberian Kredit di PT.BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang sudah baik. Dikarenakan dalam Sistem Akuntansi pemberian kredit tersebut sudah terdapat prosedur mengenai; (a) penyusunan perencanaan perkreditan (b) proses putusan kredit (c) proses penyusunan perjanjian</p>

				<p> kredit (d) dokumentasi dan administrasi kredit</p> <p> (e) pengawasan dan pembinaan kredit (f) pelunasan kredit</p>
4	Rotman, Guasmin, dan Dicky Yusuf (2018)	Analisis Sistem Pemberian Kredit Pada PT. Bank Sulteng	Kualitatif Deskriptif	<p> Analisis sistem pemberian kredit pada PT.Bank Sulteng menunjukkan bahwa prosedur dari pemberian kredit sesuai dengan prosedur perkreditan secara umum, hal ini dapat dibuktikan dengan saling terorganisasinya bagian-bagian yang terlibat dalam pengurusan permohonan kredit, sistem pemberian kredit pada PT.Bank Sulteng sudah efektif dan terkontrol</p>

Sumber: Data yang diolah dari <https://scholar.google.com/>

Yang menjadi acuan penulis dari hasil penelitian terdahulu ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia (2019) dengan judul Analisis Prosedur Pemberian Kredit dan Penagihan Piutang Dalam Meminimalkan Piutang Tidak Tertagih Pada PT Aneka Tata Niaga. Adapun perbedaan ini dengan peneliti terdahulu tersebut adalah objek penelitiannya dimana objek penelitian ini dilakukan pada PT.BTN Kantor Cabang Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Subjek Penelitian

Lingkup objek pada penelitian ini adalah PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan, yang beralamat di Jl. Pemuda No.10A, A U R Medan Maimun, Sumatera Utara 20151 . Subjek pada penelitian ini yang ditetapkan mengenai prosedur pemberian dan penagihan kredit.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, permasalahan berangkat dari fenomena bisnis secara realitas dan kemudian dihubungkan dengan teori dan kajian pustaka.

Menurut Wahyu Purhantara Penelitian Kualitatif adalah :

Suatu pendekatan dalam penelitian yang memanfaatkan penelitian sebagai instrumen, sehingga terjadi hubungan antara peneliti dengan fakta yang diteliti. Dalam hal ini fakta dipandang sebagai suatu dimensi yang bersifat subjektif dan tidak bebas dari nilai.²⁷

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut sugiono **“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”²⁸**

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah bagian penerimaan kredit dan bagian penagihan kredit PT.

²⁷ Wahyu Purhantara, **Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 166

²⁸ Sugiono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D**, Edisi Baru, Alfabeta, Bandung, 2016, hal. 80

BTN Kantor Cabang Medan. Sehingga jumlah populasinya adalah 33 orang dengan rincian pada tabel.

Tabel 3.1
Data Bagian Pemberian dan Penagihan Kredit PT.BTN Kantor Cabang Medan

Bagian Pemberian Kredit		Bagian Penagihan Kredit	
Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
Consumer Loan Sales	1	Administration staff	1
Consumer loan service	1	Branch collection & Recovery Unit Head	2
Verification officer	1	Collection koordinator, staff, dan strategy	3
analyst	1	Field collector team leader	2
Officer OTS (on the spot)	1	Hard and moderate collection	2
Credit breaker	1	Recovery & Asset Sales Departement	4
Signing Officer	1	Middle Bucket departement head	4
Defrost breaker	1	Kolektor	7
Jumlah	8		25

Sumber: PT. BTN Kantor Cabang Medan

2. Sampel

Menurut Sugiono, **“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”**.²⁹ Sampel yang diambil dari populasi harus *representatif*.

Burhan Burngin:

²⁹ Ibid, hal. 81

“Teknik ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian”³⁰.

Maka yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah karyawan atau pegawai yang bertugas dibagian penerimaan dan penagihan kredit masing-masing sebanyak 8 orang pada PT.BTN Kantor Cabang Medan.

3.4 Sumber Data

Sumber data dapat dikatakan sebagai awal dari mana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Menurut Wahyu Purhantara : **“Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi atau peneliti secara langsung dan data tersebut belum pernah diolah oleh orang lain.”³¹**

Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hasil wawancara. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara ke bagian penerimaan kredit (8 orang) dan ke bagian penagihan kredit (25 orang) untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit dan penagihan kredit.

2. Data sekunder

³⁰ Burgin Burhan, **Metode Penelitian Sosial & Ekonomi**, Edisi Pertama: Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, hal 118

³¹ **Ibid**, hal 8

Menurut Elvis F.Purba dan Parulian Simanjuntak mengatakan bahwa :
“Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instalasi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga”³². Data sekunder ini yaitu dapat berupa SOP Pemberian dan Penagihan Kredit.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian pada PT. BTN Kantor Cabang Medan, penulis melakukan teknik penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Metode ini bertujuan untuk mencari landasan teori yang sesuai dengan landasan bahan skripsi dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari berbagai buku-buku teori dan catatan kuliah yang berhubungan dengan pokok bahasan skripsi yang merupakan data sekunder.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan cara untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan topik penelitian dengan peninjauan langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung mengenai prosedur pemberian dan penagihan kredit. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

³² Elvis F.Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian** : Universitas HKBP Nommensen Medan, 2011, Hal.106

- a. Metode Kuesioner, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada bagian pemberi kredit dan bagian penagih kredit untuk mengetahui informasi khusus yang berkaitan dengan prosedur pemberian dan penagihan kredit. Penulis akan menyebarkan kuesioner kepada bagian pemberian dan penagihan kredit.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang terakit langsung dengan penelitian ini.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan metode champion.

1. Metode Analisis Deskriptif

Menurut Sonny Leksono metode deskriptif adalah :

Sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.³³

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, dimana data yang dikumpulkan disusun, di interpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan

³³ Sonny Leksono, **Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi : Dari Metodologi ke Metode**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal181

antar fenomena yang diselidiki. Metode ini menggambarkan bagaimana prosedur pemberian dan penagihan kredit pada PT. BTN Kantor Cabang Medan.

2. Metode Analisis Champion

Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan prosedur pemberian dan penagihan kredit pada perusahaan adalah dengan menggunakan perhitungan atas kuesioner dengan menggunakan rumus Dean J. Champion. Penggunaan metode champion ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dikutip dari jurnal Magdalena Daos, Yohana Febiani Anggi dengan judul Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Perlakuan Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada UD. Angkasa Raya Kupang.

Alternatif jawaban dari kuesioner yang dibuat oleh penulis ad dua yaitu “Ya” dan “Tidak”. Setelah kuesioner yang telah disebarkan kepada bagian pemberian dan penagihan kredit telah dijawab semua, maka hasil jawaban kuesioner tersebut akan dihitung dengan menggunakan skala penilaian berdasarkan rumusan champion.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Ya}}{\text{Jumlah Jawaban Kuisoner}} \times 100\%$$

Berdasarkan klasifikasi diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **0,00 – 0,25% = Prosedur dalam pemberian dan penagihan kredit tidak efektif dilakukan**
2. **0,26 – 0,50% = Prosedur dalam pemberian dan penagihan kredit kurang efektif dilakukan**
3. **0,51 – 0,75 = Prosedur dalam pemberian dan penagihan kredit cukup efektif dilakukan**
4. **0,76 – 1,00 = Prosedur dalam pemberian dan penagihan kredit sangat efektif dilakukan³⁴**

³⁴ Magdalena Daos, Yohana Febiani Angi, **Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Perlakuan Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada UD. Angkasa Raya Kupang**, Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Vol.7, No.1, 2019, Hal.8, <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JAK/articel/view/1298/1028>

